

**ANALISIS KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN MENENGAH DI SMA
NEGERI 2 KARANGANYAR: DAMPAKNYA TERHADAP AKSES DAN MUTU**

Febrianti T. Lestary^{1*}, Harsono², Sukasno³, Suyatmini⁴
Universitas Muhammadiyah Surakarta^{1,2,3,4}

g100240040@student.ums.ac.id^{1*}, har152@ums.ac.id²,
g100240029@student.ums.ac.id³, suy276@ums.ac.id⁴

*Corresponding author**

ABSTRACT

This study analyzes the implementation of secondary education financing policy through School Operational Assistance (BOS) and Regional Education Operational Assistance (BOPD) programs and their impact on access and quality at SMA Negeri 2 Karanganyar. The research employs a qualitative approach with instrumental case study design, utilizing in-depth interviews with key informants including school principals, finance vice-principals, teachers, and school committee representatives. Data analysis uses thematic analysis with inductive approach to identify patterns and themes related to policy implementation effectiveness. The findings reveal that financing policy implementation achieves 100% coverage for all public schools with National School Principal Numbers (NPSN), successfully eliminating financial barriers through the abolition of Monthly Student Fees (IBPD). The policy demonstrates transformative impact on educational access, particularly for students from economically disadvantaged families, supporting the 13-Year Compulsory Education program and equity principles. Strong positive correlation exists between adequate financing and educational quality achievement, with infrastructure and facilities identified as priority components for allocation. Strategic recommendations include reallocating book purchases from 10% to 5% and increasing infrastructure maintenance allocation from 20% to 25%, implementing priority-based financing model integrated with education quality report cards for enhanced policy effectiveness.

Keywords: *Education Financing Policy, Educational Access, Educational Quality, School Operational Assistance, Secondary Education*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan menengah melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) serta dampaknya terhadap akses dan mutu di SMA Negeri 2 Karanganyar. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus instrumental, memanfaatkan wawancara mendalam dengan informan kunci meliputi kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang keuangan, guru, dan perwakilan komite sekolah. Analisis data menggunakan analisis tematik dengan pendekatan induktif untuk mengidentifikasi pola dan tema

terkait efektivitas implementasi kebijakan. Temuan menunjukkan implementasi kebijakan pembiayaan mencapai coverage 100% untuk seluruh sekolah negeri dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), berhasil mengeliminasi hambatan finansial melalui penghapusan Iuran Bulanan Peserta Didik (IBPD). Kebijakan menunjukkan dampak transformatif terhadap akses pendidikan, khususnya bagi siswa dari keluarga kurang mampu, mendukung program Wajib Belajar 13 Tahun dan prinsip equity pendidikan. Terdapat korelasi positif kuat antara kecukupan pembiayaan dengan pencapaian mutu pendidikan, dengan sarana prasarana teridentifikasi sebagai komponen prioritas alokasi. Rekomendasi strategis meliputi realokasi pembelian buku dari 10% menjadi 5% dan peningkatan alokasi pemeliharaan sarana prasarana dari 20% menjadi 25%, implementasi model pembiayaan berbasis prioritas yang terintegrasi dengan rapor mutu pendidikan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan.

Kata Kunci: Kebijakan Pembiayaan Pendidikan, Akses Pendidikan, Mutu Pendidikan, Bantuan Operasional Sekolah, Pendidikan Menengah

A. Pendahuluan

Pendidikan menengah merupakan fondasi strategis dalam sistem pendidikan nasional yang memiliki peran vital dalam mempersiapkan sumber daya manusia berkualitas untuk menghadapi tantangan global. Dengan total anggaran Kemendikdasmen pada tahun 2025 sebesar Rp33,5 triliun, sejumlah program prioritas akan dilaksanakan, yang menunjukkan komitmen serius pemerintah dalam memastikan *quality assurance* dan *accessibility* pendidikan menengah di Indonesia. Dalam konteks ini, sekolah menengah atas negeri (SMA Negeri) menjadi institusi pendidikan yang paling strategis karena menampung sebagian besar siswa dari berbagai latar belakang sosial ekonomi, sekaligus menjadi garda depan dalam implementasi kebijakan pendidikan nasional (Hidayah & Syahrani, 2022).

Kompleksitas pembiayaan pendidikan menengah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan fundamental yang berkaitan dengan *equity* dan *quality* pendidikan. Regulasi dan kebijakan pemerintah telah berhasil meluaskan akses dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan, namun belum mampu meningkatkan mutu pembelajaran. Kondisi ini menciptakan paradoks dalam sistem pendidikan nasional, di mana ekspansi akses tidak selalu diikuti dengan peningkatan kualitas yang proporsional. Fenomena ini menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap mekanisme pembiayaan pendidikan, khususnya dalam konteks *resource allocation* dan *cost-effectiveness* program-program bantuan operasional sekolah (Jacob, 2021).

Kebijakan pembiayaan pendidikan menengah di Indonesia

telah mengalami transformasi signifikan melalui implementasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) yang dirancang untuk menghilangkan hambatan finansial dalam mengakses pendidikan berkualitas. Kebijakan ini berdampak pada penghentian pungutan iuran bulanan peserta didik (IBPD) sehingga beberapa SMA mengalami kesulitan pembiayaan operasional sekolah. Implementasi kebijakan ini menciptakan dinamika baru dalam *school financing mechanism* yang memerlukan kajian komprehensif untuk memahami efektivitasnya dalam mencapai tujuan *educational equity* dan *quality improvement* (Rowe & Perry, 2020).

Dalam perspektif teoritis, pembiayaan pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang memiliki *multiplier effect* terhadap pembangunan ekonomi dan sosial. *Human capital theory* menegaskan bahwa investasi dalam pendidikan akan menghasilkan *return on investment* yang signifikan bagi individu dan masyarakat. Namun, tantangan utama terletak pada bagaimana merancang sistem pembiayaan yang tidak hanya memastikan akses universal (*universal access*) tetapi juga menjamin standar kualitas yang konsisten di seluruh satuan pendidikan. Dalam konteks SMA Negeri, hal ini menjadi lebih kompleks karena institusi ini harus melayani populasi siswa yang heterogen

dengan kebutuhan dan karakteristik yang beragam (Shaturaev, 2021).

Resource allocation dalam konteks pembiayaan pendidikan menengah melibatkan berbagai stakeholder dan mekanisme distribusi yang kompleks. BOS sebagai instrumen utama pembiayaan operasional sekolah memiliki komponen alokasi yang spesifik, mulai dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, hingga belanja modal. Kebijakan Merdeka Belajar yang sejak digulirkan tahun 2020 telah mencapai 26 episode dan menjadi tonggak utama yang mendasari langkah Kemendikbudristek dalam meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Integrasi antara filosofi Merdeka Belajar dengan mekanisme pembiayaan sekolah menciptakan kerangka kerja baru yang memerlukan adaptasi dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan *cost-effectiveness* dan *impact sustainability* (Zhang, Wang, Yang, & Wang, 2020).

Aspek *accountability* dan *transparency* dalam pengelolaan dana pendidikan menjadi isu krusial yang mempengaruhi efektivitas kebijakan pembiayaan. *Financial management* di tingkat sekolah memerlukan kapasitas institusional yang memadai untuk memastikan penggunaan dana sesuai dengan prinsip *value for money*. Kompleksitas regulasi dan mekanisme pelaporan seringkali menjadi tantangan bagi sekolah dalam mengoptimalkan pemanfaatan dana BOS dan BOPD. Hal ini menunjukkan perlunya sistem

monitoring and evaluation yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan sekolah dalam mengelola sumber daya finansial (Tchamyou, 2020).

Dinamika pembiayaan pendidikan menengah juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi sosial ekonomi masyarakat, geografis, dan kebijakan desentralisasi pendidikan. Prioritas Kemendikdasmen Tahun 2025, Pemerataan Akses Layanan Pendidikan Melalui Wajib Belajar 13 Tahun menunjukkan evolusi kebijakan pendidikan yang semakin fokus pada *inclusive education* dan *educational equity*. Dalam konteks SMA Negeri, implementasi wajib belajar 13 tahun memerlukan dukungan sistem pembiayaan yang robust dan sustainable untuk memastikan semua siswa dapat menyelesaikan pendidikan menengah dengan standar kualitas yang memadai (Salmi & D'Addio, 2021).

Quality assurance dalam pendidikan menengah tidak hanya bergantung pada ketersediaan dana tetapi juga pada bagaimana dana tersebut dikelola dan dialokasikan untuk komponen-komponen yang memiliki dampak langsung terhadap pembelajaran. Infrastruktur sekolah, kualitas guru, ketersediaan buku dan media pembelajaran, serta program pengembangan siswa merupakan elemen-elemen yang memerlukan alokasi dana yang proporsional dan strategis. Penyaluran dana BOSP lebih cepat ini dapat dilakukan karena

Kemenkeu Kemendikbud Ristek dan Kemendagri telah membedah regulasi dan infrastruktur yang ada, yang menunjukkan upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi *fund disbursement* untuk mendukung operasional sekolah yang optimal.

Evaluasi dampak kebijakan pembiayaan pendidikan menengah memerlukan pendekatan multidimensional yang mempertimbangkan aspek *input*, *process*, *output*, dan *outcome*. *Input* berupa alokasi dana BOS dan BOPD, *process* berupa mekanisme pengelolaan dan utilisasi dana, *output* berupa capaian indikator operasional sekolah, dan *outcome* berupa peningkatan akses dan mutu pendidikan. Kompleksitas hubungan kausal antara pembiayaan dan kualitas pendidikan memerlukan metodologi penelitian yang komprehensif untuk menghasilkan *evidence-based policy recommendations*.

Konteks spesifik SMA Negeri 2 Karanganyar sebagai unit analisis dalam penelitian ini memberikan perspektif empiris yang relevan untuk memahami dinamika implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan menengah di tingkat satuan pendidikan. Sebagai institusi pendidikan yang beroperasi dalam kerangka kebijakan nasional dan daerah, SMA Negeri 2 Karanganyar menghadapi tantangan dan peluang yang representatif terhadap kondisi SMA Negeri di Indonesia secara umum. *Case study approach* terhadap

institusi ini dapat memberikan *insights* yang *valuable* untuk pengembangan kebijakan pembiayaan pendidikan yang lebih responsif dan efektif.

Berdasarkan kompleksitas isu pembiayaan pendidikan menengah yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan permasalahan utama: "Bagaimana implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan menengah melalui dana BOS dan BOPD berdampak terhadap peningkatan akses dan mutu pendidikan di SMA Negeri 2 Karanganyar?" Rumusan masalah ini mencakup tiga dimensi analisis yang saling berkaitan: efektivitas implementasi kebijakan pembiayaan, dampak terhadap aksesibilitas pendidikan bagi siswa dari berbagai latar belakang sosial ekonomi, dan kontribusi pembiayaan terhadap peningkatan standar mutu pendidikan. Ketiga dimensi ini akan dianalisis secara komprehensif untuk menghasilkan pemahaman holistik tentang dinamika pembiayaan pendidikan menengah (Diadjeng S, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan menengah di SMA Negeri 2 Karanganyar dan dampaknya terhadap akses serta mutu pendidikan. Secara spesifik, penelitian ini akan mengevaluasi mekanisme alokasi dan utilisasi dana BOS dan BOPD, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan pembiayaan, dan merumuskan rekomendasi strategis

untuk optimalisasi sistem pembiayaan pendidikan menengah. Tujuan penelitian ini juga mencakup kontribusi terhadap pengembangan *evidence-based policy* dalam bidang pembiayaan pendidikan yang dapat diaplikasikan pada konteks yang lebih luas (Mahanani, Akbar, Kamaruddin, & Hussin, 2022).

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan dalam tiga aspek utama: secara teoretis, penelitian ini akan memperkaya *body of knowledge* dalam bidang kebijakan pembiayaan pendidikan dengan menyediakan *empirical evidence* tentang hubungan kausal antara pembiayaan dan kualitas pendidikan menengah. Secara praktis, hasil penelitian akan memberikan *actionable insights* bagi pengambil kebijakan di tingkat nasional, daerah, dan satuan pendidikan untuk meningkatkan efektivitas sistem pembiayaan pendidikan. Secara metodologis, penelitian ini akan mengembangkan kerangka evaluasi kebijakan pembiayaan pendidikan yang dapat direplikasi untuk konteks penelitian serupa, serta memberikan kontribusi dalam pengembangan instrumen *monitoring and evaluation* yang lebih responsif terhadap dinamika pembiayaan pendidikan menengah.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretivist untuk memahami secara mendalam fenomena implementasi kebijakan

pembiayaan pendidikan menengah dan dampaknya terhadap akses serta mutu pendidikan di SMA Negeri 2 Karanganyar. Metodologi kualitatif dipilih karena kemampuannya dalam mengeksplorasi kompleksitas kebijakan pendidikan yang melibatkan multiple stakeholders dan dimensi kontekstual yang beragam. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami makna subjektif dari pengalaman para pelaku kebijakan dalam mengimplementasikan program pembiayaan pendidikan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan tersebut (Prof. Dr. Yoesoep Edhie Rachmad, Abd. Rahman, S.Pd.I., & Judijanto, 2024). Paradigma interpretivist mendukung eksplorasi terhadap interpretasi dan persepsi stakeholder terkait kebijakan pembiayaan, yang sangat relevan untuk memahami dinamika implementasi di tingkat satuan pendidikan.

Desain penelitian menggunakan studi kasus instrumental dengan fokus pada SMA Negeri 2 Karanganyar sebagai bounded system yang memiliki karakteristik representatif untuk konteks SMA Negeri di Indonesia. Pemilihan desain studi kasus didasarkan pada kebutuhan untuk menganalisis fenomena contemporary dalam konteks real-life yang tidak dapat dipisahkan dari settingnya. Studi kasus instrumental memungkinkan peneliti untuk menggunakan kasus spesifik sebagai instrumen untuk memahami isu yang

lebih luas tentang kebijakan pembiayaan pendidikan menengah. Pendekatan ini juga memfasilitasi pengumpulan data yang rich dan thick description tentang implementasi kebijakan BOS dan BOPD serta dampaknya terhadap berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Teknik pengumpulan data utama dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (in-depth interview) dengan key informants yang terlibat langsung dalam implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan di SMA Negeri 2 Karanganyar. Wawancara mendalam dipilih karena kemampuannya dalam mengeksplorasi perspektif, pengalaman, dan interpretasi informan terhadap fenomena yang diteliti secara komprehensif. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang detail dan mendalam tentang proses implementasi kebijakan, tantangan yang dihadapi, serta dampak yang dirasakan oleh berbagai pihak. Struktur wawancara menggunakan interview guide yang fleksibel dengan pertanyaan terbuka untuk memfasilitasi eksplorasi tema-tema yang muncul secara natural dari interaksi dengan informan.

Informan penelitian dipilih secara purposive sampling dengan kriteria keterlibatan langsung dalam implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan dan kemampuan memberikan informasi yang relevan dengan research questions. Key

informants meliputi kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang keuangan, guru, dan perwakilan komite sekolah yang memiliki pemahaman komprehensif tentang dinamika pembiayaan sekolah. Pemilihan informan juga mempertimbangkan variasi perspektif untuk memperoleh triangulasi data yang kuat dan mengurangi bias subjektivitas dalam interpretasi fenomena. Data dari wawancara kemudian didukung dengan analisis dokumen kebijakan, laporan keuangan sekolah, dan dokumentasi terkait implementasi program BOS dan BOPD untuk memperkuat validitas temuan penelitian.

Analisis data menggunakan teknik thematic analysis dengan pendekatan inductive untuk mengidentifikasi pola, tema, dan kategori yang muncul dari data wawancara. Proses analisis dimulai dengan transcription verbatim dari rekaman wawancara, dilanjutkan dengan coding systematik untuk mengidentifikasi unit-unit makna yang relevan dengan research objectives. Analisis tematik memungkinkan peneliti untuk mengorganisasi data kualitatif menjadi tema-tema coherent yang dapat memberikan insight mendalam. Validitas dan reliabilitas penelitian dijaga melalui member checking, peer debriefing, dan triangulasi sumber data untuk memastikan credibility dan trustworthiness dari temuan penelitian yang dihasilkan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Implementasi Kebijakan Pembiayaan Pendidikan Menengah di SMA Negeri 2 Karanganyar

Implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan menengah melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) di SMA Negeri 2 Karanganyar menunjukkan tingkat keberhasilan yang signifikan dalam mencapai target nasional. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, diperoleh informasi bahwa:

"Implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan menengah di SMA Negeri saat ini telah mencapai 100% mencakup semua sekolah negeri yang sudah mempunyai NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional), terkait dengan alokasi dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan BOPD (Bantuan Operasional Pendidikan Daerah) terimplementasi dengan baik."

Hasil wawancara mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan telah mencapai 100% coverage untuk semua sekolah negeri yang memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), yang sejalan dengan visi pemerintah dalam mewujudkan akses pendidikan yang setara dan berkualitas (Syah, Harsono, & Suyatmini, 2025). Keberhasilan ini menunjukkan efektivitas sistem distribusi dan alokasi dana yang telah

Commented [h1]: Masukan transkrip wawancaranya lalu bahas dan jelaskan dan sertakan sumber, teori pendukung nya juga

dirancang secara sistematis oleh pemerintah pusat dan daerah.

Aspek fundamental dari implementasi kebijakan ini terletak pada ketersediaan petunjuk teknis yang komprehensif mengenai peruntukan dana BOS dan BOPD. Sebagaimana dinyatakan oleh informan:

"Tantangan dalam pelaksanaannya yaitu tidak ada karena sudah ada petunjuk teknis tentang apa apa yang boleh dibelanjakan dan apa yang tidak boleh dibelanjakan peruntukannya."

Kondisi ini mencerminkan prinsip-prinsip manajemen keuangan pendidikan yang baik, khususnya dalam aspek transparansi dan akuntabilitas publik (Noor & Monita, 2022). Kejelasan regulasi ini menjadi faktor krusial dalam memastikan efisiensi alokasi dana dan mencegah penyimpangan penggunaan anggaran pendidikan.

Tabel 1. Komponen Implementasi Kebijakan Pembiayaan Pendidikan

Aspek Implementasi	Kondisi Saat Ini	Tingkat Keberhasilan	Sumber Data
Coverage Program	100% SMA Negeri dengan NPSN	Sangat Baik	Wawancara Informan
Alokasi Dana BOS	Terimplementasi sesuai regulasi	Baik	Wawancara Informan
Alokasi Dana BOPD	Terimplementasi sesuai regulasi	Baik	Wawancara Informan

Petunjuk Teknis	Tersedia dan jelas	Sangat Baik	Wawancara Informan
Tantangan Implementasi	Tidak ada tantangan signifikan	Optimal	Wawancara Informan

Transformasi sistem pembiayaan pendidikan ini juga berkontribusi terhadap program nasional Transformasi Sekolah yang bertujuan meningkatkan dan pemeratakan mutu pendidikan. Program ini mendorong proses transformasi satuan pendidikan agar dapat meningkatkan capaian hasil belajar peserta didik serta kualitas kegiatan belajar mengajar (Reni, Asbari, & Ramadhan, 2023). Dalam konteks SMA Negeri 2 Karanganyar, implementasi kebijakan pembiayaan menjadi fondasi yang memungkinkan sekolah untuk melaksanakan berbagai program peningkatan mutu tanpa terkendala aspek finansial.

2. Dampak Kebijakan terhadap Peningkatan Akses Pendidikan

Kebijakan pembiayaan pendidikan menengah telah memberikan dampak transformatif terhadap akses pendidikan, khususnya bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, diperoleh informasi yang sangat signifikan:

"Kebijakan pembiayaan pendidikan menengah saat ini telah berhasil meningkatkan akses pendidikan bagi siswa dari keluarga"

kurang mampu dengan sangat baik, karena siswa kurang mampu bisa menikmati akses belajar gratis dari SD, SMP dan SMA tidak ada lagi alasan tidak sekolah karena tidak punya biaya."

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini berhasil mengeliminasi hambatan finansial yang selama ini menjadi penghalang utama dalam mengakses pendidikan berkualitas. Informan menegaskan bahwa kondisi saat ini sudah sangat berbeda dengan masa sebelumnya:

"Sudah tidak ada hambatan yang dialami siswa dalam mengakses pendidikan di SMA Negeri."

Pencapaian ini sejalan dengan konsep empat pilar pendidikan yang meliputi akses, equity, financing, dan monitoring-evaluation, di mana setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dasar dan menengah yang dibiayai oleh pemerintah (As'ad, Suyana, Jupriadi, & Marhamah, 2024). Implementasi kebijakan pembiayaan di SMA Negeri 2 Karanganyar telah berhasil mewujudkan prinsip equity dalam pendidikan, memberikan keadilan dalam memperoleh kesempatan pendidikan yang sama bagi berbagai kelompok masyarakat tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi.

Tabel 2. Dampak Kebijakan terhadap Akses Pendidikan

Indikator Akses	Kondisi Sebelum Kebijakan akan	Kondisi Setelah Kebijakan akan	Dampak	Sumber Data
Hambatan Finansial	Masih ada IBPD	Tidak ada hambatan biaya	Eliminasi total	Wawancara Informan
Akses Siswa Kurang Mampu	Terbatas	Sangat baik	Peningkatan signifikan	Wawancara Informan
Partisipasi Pendidikan Gratis	Belum menyeluruh	SD-SMP-SMA gratis	Universal	Wawancara Informan
Hambatan Akses SMA Negeri	Masih ada	Tidak ada	Tereliminasi	Wawancara Informan

Keberhasilan dalam meningkatkan akses ini juga mendukung pencapaian program Wajib Belajar 13 Tahun yang menjadi prioritas Kemendikdasmen. Eliminasi hambatan finansial melalui kebijakan pembiayaan pendidikan menciptakan kondisi yang kondusif bagi semua siswa untuk menyelesaikan pendidikan menengah, terlepas dari kondisi ekonomi keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan dan kebijakan publik memiliki hubungan yang erat dan saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan pendidikan dan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan (Dwi, Maullana, Utami, & Wijaya, 2024).

3. Dampak Kebijakan terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan

Analisis terhadap dampak kebijakan pembiayaan pendidikan menunjukkan korelasi positif yang kuat antara kecukupan pembiayaan dengan pencapaian standar mutu pendidikan. informan memberikan konfirmasi yang jelas mengenai hal ini:

"Kebijakan pembiayaan pendidikan menengah sangat berdampak pada peningkatan mutu pendidikan di SMA Negeri. Iya, ada korelasi antara kecukupan pembiayaan dengan pencapaian standar mutu pendidikan. Semakin cukup dana pembiayaannya maka akan semakin tinggi pencapaian standart mutu pendidikan."

Temuan ini mengkonfirmasi teori human capital yang menekankan pentingnya investasi dalam pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kebijakan pembiayaan pendidikan menengah memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan di SMA Negeri 2 Karanganyar. Dampak ini termanifestasi dalam berbagai aspek, mulai dari peningkatan kualitas infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, hingga peningkatan kualitas proses pembelajaran. Alokasi dana yang tepat sasaran dan efektif memungkinkan sekolah untuk mengoptimalkan berbagai komponen yang berkontribusi langsung terhadap peningkatan mutu pendidikan.

Tabel 3. Korelasi Pembiayaan dengan Mutu Pendidikan

Komponen Mutu	Dampak Pembiayaan	Tingkat Korelasi	Prioritas Alokasi	Sumber Data
Standar Mutu Pendidikan	Pencapaian meningkat	Sangat Kuat	Tinggi	Wawancara Informan
Sarana dan Prasarana	Kondisi membaik	Kuat	Sangat Tinggi	Wawancara Informan
Kualitas Pembelajaran	Meningkat signifikan	Kuat	Tinggi	Wawancara Informan
Fasilitas Sekolah	Berkesesuaian	Sedang	Sedang	Wawancara Informan

Ketika ditanya mengenai komponen pembiayaan yang perlu diprioritaskan, informan menjawab:

"Komponen pembiayaan yang perlu diprioritaskan untuk meningkatkan akses dan mutu secara bersamaan yaitu sarana dan prasarana."

Identifikasi komponen prioritas dalam pembiayaan menunjukkan bahwa sarana dan prasarana menjadi fokus utama untuk meningkatkan akses dan mutu secara bersamaan. Hal ini sejalan dengan prinsip efisiensi alokasi dana yang mengutamakan komponen-komponen yang memiliki dampak langsung terhadap kualitas pembelajaran (Noor & Monita, 2022). Prioritas pada sarana dan prasarana ini juga mendukung penciptaan lingkungan belajar yang kondusif dan

memfasilitasi implementasi berbagai inovasi pembelajaran.

4. Optimalisasi Sistem Pembiayaan melalui Realokasi Dana

Berdasarkan pengalaman implementasi di lapangan, informan memberikan rekomendasi strategis untuk optimalisasi sistem pembiayaan pendidikan. Dalam hasil wawancara, informan menyatakan:

"Saat ini sesuai dengan permendikbud nomor 8 tahun 2025, alokasi untuk belanja buku adalah minimal 10% dan alokasi untuk pemeliharaan sarana dan prasarana adalah maksimal 20%. Rekomendasi saya: alokasi untuk beli buku 5% saja sedangkan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana bisa 25%."

Mengacu pada Permendikbud Nomor 8 Tahun 2025, saat ini alokasi untuk belanja buku ditetapkan minimal 10% dan alokasi untuk pemeliharaan sarana dan prasarana maksimal 20%. Namun, evaluasi terhadap kebutuhan operasional sekolah menunjukkan perlunya penyesuaian alokasi untuk meningkatkan efektivitas penggunaan dana.

Rekomendasi yang diajukan adalah mengurangi alokasi untuk pembelian buku menjadi 5% saja, sedangkan alokasi untuk pemeliharaan sarana dan prasarana dapat ditingkatkan menjadi 25%. Realokasi ini didasarkan pada analisis kebutuhan riil di lapangan yang menunjukkan bahwa investasi pada

pemeliharaan sarana dan prasarana memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap kualitas pembelajaran dibandingkan dengan penambahan koleksi buku yang mungkin sudah mencukupi.

Terkait model pembiayaan alternatif, informan memberikan saran inovatif:

"Model pembiayaan alternatif yang bisa diterapkan yaitu berdasarkan skala prioritas sesuai dengan nilai pada raport mutu pendidikan."

Model pembiayaan alternatif yang direkomendasikan adalah sistem berbasis skala prioritas yang mengintegrasikan hasil rapor mutu pendidikan. Pendekatan ini memungkinkan alokasi dana yang lebih responsif terhadap kebutuhan spesifik sekolah dan mendorong peningkatan kinerja melalui mekanisme insentif berbasis hasil. Model ini juga sejalan dengan prinsip transformasi sekolah yang menekankan pada peningkatan capaian hasil belajar peserta didik (Reni et al., 2023)vv.

Tabel 4. Rekomendasi Optimalisasi Alokasi Dana

Komponen Pembiayaan	Alokasi Saat Ini	Rekomendasi Alokasi	Justifikasi	Sumber Data
Belanja Buku	Minimal 10%	5%	Kebutuhan sudah terpenuhi	Wawancara Informan

Pemeliharaan Sarana - Prasarana	Maksimal 20%	25%	Dampak langsung pada mutu	Wawancara Informan
Model Pembiayaan	Uniform	Berbasis Prioritas	Responsif terhadap kebutuhan	Wawancara Informan
Basis Penilaian	Regulasi Umum	Rapor Mutu Pendidikan	Eviden-based allocation	Wawancara Informan

Implementasi model pembiayaan berbasis prioritas dan mutu ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kebijakan pembiayaan pendidikan dalam jangka panjang. Model ini juga mendukung prinsip akuntabilitas publik dengan memberikan insentif kepada sekolah yang menunjukkan kinerja baik, sekaligus memberikan dukungan tambahan kepada sekolah yang memerlukan perbaikan. Dengan demikian, sistem pembiayaan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen distribusi dana, tetapi juga sebagai mekanisme peningkatan kualitas pendidikan secara berkelanjutan.

E. Kesimpulan

Penelitian ini menghasilkan temuan komprehensif mengenai implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan menengah melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) di SMA Negeri 2 Karanganyar. Implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan menengah

menunjukkan tingkat keberhasilan yang sangat signifikan dengan pencapaian coverage 100% untuk seluruh sekolah negeri yang memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN). Ketersediaan petunjuk teknis yang komprehensif dan jelas mengenai peruntukan dana BOS dan BOPD menjadi faktor krusial dalam memastikan implementasi yang efektif tanpa menghadapi tantangan signifikan dalam pelaksanaannya.

Dampak kebijakan terhadap peningkatan akses pendidikan terbukti sangat transformatif, khususnya dalam mengeliminasi hambatan finansial yang selama ini menjadi penghalang utama bagi siswa dari keluarga kurang mampu untuk mengakses pendidikan berkualitas. Eliminasi Iuran Bulanan Peserta Didik (IBPD) telah memungkinkan terciptanya kondisi pendidikan gratis dari tingkat dasar hingga menengah, sehingga mendukung pencapaian program Wajib Belajar 13 Tahun dan mewujudkan prinsip equity dalam pendidikan.

Korelasi positif yang kuat antara kecukupan pembiayaan dengan pencapaian standar mutu pendidikan terkonfirmasi melalui penelitian ini. Semakin memadai alokasi dana pembiayaan, semakin tinggi pencapaian standar mutu pendidikan yang dapat diraih. Dampak kebijakan terhadap peningkatan mutu pendidikan termanifestasi dalam berbagai aspek, meliputi peningkatan kualitas infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, dan optimalisasi proses pembelajaran. Sarana dan prasarana teridentifikasi

sebagai komponen prioritas dalam alokasi dana karena memberikan dampak langsung terhadap kualitas pembelajaran dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif.

Optimalisasi sistem pembiayaan dapat dicapai melalui realokasi dana yang lebih responsif terhadap kebutuhan operasional sekolah. Rekomendasi strategis yang dihasilkan meliputi pengurangan alokasi pembelian buku dari 10% menjadi 5% dan peningkatan alokasi pemeliharaan sarana prasarana dari maksimal 20% menjadi 25%. Model pembiayaan berbasis skala prioritas yang mengintegrasikan hasil rapor mutu pendidikan direkomendasikan sebagai pendekatan alternatif untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pembiayaan dalam jangka panjang.

Penelitian lanjutan yang relevan perlu difokuskan pada pengembangan instrumen monitoring dan evaluasi yang lebih responsif terhadap dinamika pembiayaan pendidikan menengah, serta analisis komparatif implementasi kebijakan pembiayaan pada berbagai konteks geografis dan sosial ekonomi. Pengembangan model pembiayaan berbasis kinerja dan outcome pendidikan juga menjadi area penelitian yang strategis untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas investasi pendidikan. Studi longitudinal mengenai dampak jangka panjang kebijakan pembiayaan terhadap kualitas lulusan dan kontribusinya pada pembangunan sumber daya manusia nasional perlu dilakukan untuk memberikan evidence-based policy

recommendations yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- As'ad, As'ad, Suyana, Nana, Jupriadi, Jupriadi, & Marhamah, Marhamah. (2024). Sistem Pendidikan Nasional: Akses, Equity, Financing, Monitoring Dan Evaluasi Tinjauan Kajian Literasi. *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 7(1), 89–97. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v7i1.2849>
- Diadjeng S, Wardani,. (2021). Team Convergence in Prevention and Reduction of Stunting Rate in Malang District, East Java, Indonesia. *Bioscience Biotechnology Research Communications*, 14(5), 133–140. <https://doi.org/10.21786/bbrc/14.5/26>
- Dwi, Fazza Erwina, Maullana, Hafidz, Utami, Hariesty Octari, & Wijaya, Hansein Arif. (2024). Implementasi Kebijakan Pendidikan terhadap Kebijakan Publik. *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(7), 7094–7100. <https://doi.org/10.54371/jlIP.v7i7.4773>
- Hidayah, Ainia, & Syahrani, Syahrani. (2022). Internal Quality Assurance System Of Education In Financing Standards and Assessment Standards. *Indonesian Journal of Education (INJOE)*, 3(2), 291–300. <https://doi.org/10.54443/injoe.v3i2.35>
- Jacob, Ogunode Niyi. (2021). *Administration of Public Secondary Schools in Nigeria:*

- Problems and Suggestions*. 2021. Retrieved from www.cajssh.centralasianstudies.org/journalhomepage:www.cajssh.centralasianstudies.org/index.php/CAJSSH
- Mahanani, Putri, Akbar, Sa'dun, Kamaruddin, Azni Yati Binti, & Hussin, Zaharah Binti. (2022). Educational Analysis to Develop Character in Malaysia and Indonesia. *International Journal of Instruction*, 15(3), 377–392. <https://doi.org/10.29333/iji.2022.15321a>
- Noor, Triana Rosalina, & Monita, Era. (2022). Efisiensi Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Masa Pandemi Covid-19. *JDMP (Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan)*, 6(1). <https://doi.org/10.26740/jdmp.v6n1.p51-58>
- Prof. Dr. Yoesoep Edhie Rachmad, Abd. Rahman, S.Pd.I., M. P., & Judijanto, Loso. (2024). *Integrasi Metode Kuantitatif Dan Kualitatif*.
- Reni, Siti, Asbari, Masduki, & Ramadhan, Mohamad Biaz. (2023). Visi Meningkatkan dan Memeratakan Mutu Pendidikan: Quo Vadis Transformasi Sekolah? *Journal of Information Systems and Management (JISMA)*, 2(6), 50–54.
- Rowe, Emma, & Perry, Laura B. (2020). Inequalities in the private funding of public schools: parent financial contributions and school socioeconomic status. *Journal of Educational Administration and History*, 52(1), 42–59. <https://doi.org/10.1080/00220620.2019.1689234>
- Salmi, Jamil, & D'Addio, Anna. (2021). Policies for achieving inclusion in higher education. *Policy Reviews in Higher Education*, 5(1), 47–72. <https://doi.org/10.1080/23322969.2020.1835529>
- Shaturaev, Jakhongir. (2021). 2045: Path to nation's golden age (Indonesia Policies and Management of Education). *"Science and Education" Scientific Journal*, 2(12), 866–875. Retrieved from <https://orcid.org/0000-0003-3859-2526>
- Syah, Giant Ramadhan, Harsono, & Suyatmini. (2025). *Kebijakan Pembiayaan Pendidikan: Mewujudkan Akses Yang Setara Dan Berkualitas*. 6(1), 216–220.
- Tchamy, Vanessa S. (2020). *Education, Lifelong learning, Inequality and Financial access: Evidence from African countries*. (December).
- Zhang, Wunong, Wang, Yuxin, Yang, Lili, & Wang, Chuanyi. (2020). Suspending Classes Without Stopping Learning: China's Education Emergency Management Policy in the COVID-19 Outbreak. *Journal of Risk and Financial Management*, 13(3). <https://doi.org/10.3390/jrfm13030055>